

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah secara konseptual merupakan suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh daerah dengan melibatkan seluruh stakeholders daerah secara partisipatif untuk merangsang kegiatan komersial daerah, sehingga melahirkan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut merupakan suatu cara untuk membantu menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua orang, termasuk masyarakat miskin.

Dalam proses membangun tersebut harus bertumpu pada *local values* dan *local resources* yang dimiliki oleh daerah, sehingga melahirkan ekonomi daerah yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan. Tujuan dari proses tersebut dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah, utamanya masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk dapat mencapai itu semua, pemerintah daerah tidak mungkin melakukannya secara sepihak, tetapi memerlukan dukungan dari *private sektor*, dan *civil society* (EGAT/UP and The Urban Institute, 2003: 1). Kerja sama yang berimbang dan sinergi antara ketiga aktor tersebut sangat penting dan diperlukan, karena pembangunan (negara dan daerah) merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen negara dan daerah.

Merujuk pada konsep tersebut di atas maka dapat dimaknai bahwa pembangunan (ekonomi) daerah berfokus pada potensi daerah, serta mengidentifikasi secara spesifik dan memastikan apa yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah agar komunitas unggulan yang dimiliki oleh

daerah mencapai nilai manfaat yang maksimum. Dalam artian bahwa, pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses penilaian keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh daerah, mengidentifikasi peluang pasar baru untuk bisnis, dan mengurangi hambatan untuk penciptaan produk unggulan dan pengembangan usaha daerah. Dengan adanya aktifitas ekonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Arsyad, 2002).

Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berbasis pada sumberdaya unggulan daerah dalam prakteknya pemerintah daerah diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogeneous development*), sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fiskal (Arsyad, 2002; dan Smith, 1985: 277), infrastruktur yang buruk, kurangnya kebijakan yang mendukung perekonomian daerah, dan perencanaan pembangunan yang lemah (Saragih, 2015: 7). Artinya, dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah tidak hanya diperhadapkan pada permasalahan keterbatasan sumberdaya alam yang akan dijadikannya sebagai modal dalam membangun perekonomian daerahnya. Tetapi pemerintah daerah diperhadapkan pada keterbatasan sumberdaya manusia, kelembagaan, sumberdaya fiskal atau keuangan daerah, kebijakan, infrastruktur, dan perencanaan pembangunan.

Menyimak berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan di atas maka dapat dijelaskan bahwa, dalam upaya untuk pelaksanaan pembangunan daerah sangat diperlukan desentralisasi fiskal. Pada sisi yang lain, dalam upaya untuk

melaksanakan desentralisasi fiskal sangat diperlukan dukungan pemerintah pusat secara politik dalam bentuk kebijakan yang memberikan ruang yang cukup kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah, termasuk sumber-sumber pendapatan daerah.

Dukungan politik dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat diperlukan dikarenakan penerapan desentralisasi pemerintahan, baik di negara federal maupun di negara kesatuan, sumberdaya keuangan daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerah menimbulkan beberapa permasalahan yang sangat sulit. Permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan ketersediaan sumber pendapatan daerah yang terbaik untuk daerah, seberapa besar dan luas cakupan sumber pendapatan tersebut. Pada sisi lain, tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah yang lebih tinggi, dan melemahnya posisi daerah sebagai daerah otonom sebagai akibat dari tingginya ketergantungan tersebut, yang kemudian berpengaruh terhadap melemahnya akuntabilitas dan responsibilitas pemerintah daerah (Smith, 1985: 145; Kuncoro, 2004: 8; Imawan, 2009: 150; Yani, 2009: 3; dan Muluk, 2009: 140).

Dalam *case* Indonesia, regulasi yang digunakan oleh daerah sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, serta hubungan keuangan pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi di era reformasi ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta regulasi operasionalisasinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan sebagainya.

Melalui berbagai regulasi tersebut, daerah otonom diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Kota Tidore Kepulauan yang lahir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tidore Kepulauan, yang ditetapkan pada tanggal 12 April 2003. Dengan lahirnya kebijakan politik ini maka secara yuridis Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah otonom di negara ini. Konsekuensi dari keputusan politik tersebut adalah Kota Tidore Kepulauan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai daerah otonom berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam regulasi tentang pemerintahan daerah.

Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan kewenangan, kekuasaan, urusan, serta hak dan kewajibannya sebagai daerah otonom sebagaimana yang diatur dalam paket undang-undang tentang desentralisasi, diberikan kekuasaan untuk mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan pelayanan publik di daerah. Untuk melaksanakan kewenangan, serta tugas dan tanggungjawab tersebut memerlukan dukungan sumberdaya pembangunan yang memadai. Dengan demikian, Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus berbasis pada potensi dan sumberdaya unggulan daerah yang dimilikinya.

Untuk melakukan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi potensi dan sumberdaya unggulan daerah oleh Kota Tidore Kepulauan. Identifikasi potensi sumberdaya ekonomi unggulan daerah oleh Kota Tidore Kepulauan sebagai bentuk pemanfaatan ruang kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap daerah otonom. Berkaitan dengan potensi dan sumberdaya ekonomi unggulan daerah, maka sumberdaya perekonomian daerah potensial yang dapat dikembangkan oleh Kota Tidore Kepulauan adalah pariwisata. Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya. Kekayaan pariwisata Kota Tidore Kepulauan tersebut tersaji secara detail dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2033, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025, (data kekayaan wisata disebutkan dalam bab III, Potensi wisata Kota Tidore Kepulauan).

Namun demikian, kekayaan pariwisata tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut dapat terlihat dalam data konstribuasi sektor kepariwisataan terhadap pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan dalam lima tahun terakhir (2010-2014) yang berkaitan secara langsung dengan sektor pariwisata yaitu perhotelan, restoran, serta hiburan dan rekreasi dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Kontribusi Perhotelan, Restoran, dan Hiburan dan Rekreasi Terhadap Pendapatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2014

No.	Potensi Perekonomian	Persentase Distribusi Terhadap PDRB				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Perhotelan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05
2.	Restoran	0,09	0,10	0,09	0,09	0,12
3.	Hiburan dan Rekreasi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan (2014 dan 2015)

Berdasarkan data kuantitatif di atas terbaca bahwa kontribusi sektor perekonomian Kota Tidore Kepulauan yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata sangat jauh dari harapan, yaitu dibawah 1 persen. Artinya, dengan potensi pariwisata yang sangat kaya ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah daerah. Minimnya kontribusi sektor perhotelan, restoran, serta hiburan dan rekreasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan juga terlihat dalam data hasil penelitian Kasim, et. al. (2010) tentang kontribusi pajak dan retrebusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 1,71 persen, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah sebesar 8,98 persen, dan kontribusi retrebusi jasa usaha tempat rekreasi terhadap retrebusi daerah sebesar 0,29 persen.

Belum maksimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian dan pendapatan Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dijelaskan di depan disebabkan karena pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum bersifat holistik. Dalam konsep pembangunan pariwisata, idealnya harus ditunjang oleh pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk memberikan fasilitas kepada wisatawan. Infrastruktur sebagai saran pariwisata tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Suwanto (2004) bahwa berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah destinasi wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

Namun demikian, pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan belum ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Kota Tidore Kepulauan belum memiliki

fasilitas akomodasi seperti hotel dan penginapan serta restoran yang memadai, dan belum memiliki pasar souvenir sebagai oleh-oleh untuk wisatawan. Kekurangan fasilitas penunjang pariwisata tersebut disadari oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleman. Oleh karena itu, menurut Asrul Sani, kedepan akan melakukan kerjasama dengan investor lokal untuk membangun fasilitas penunjang tersebut (Kompas.com, 21 April 2013). Artinya, dalam pembangunan pariwisata harus dilakukan secara holistik pada seluruh bidang pembangunan, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pariwisata.

Permasalahan keterbatasan pembangunan infrastruktur tersebut juga dijelaskan dalam RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-15. Dalam RPJMD tersebut menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Tidore Kepulauan adalah permasalahan pembangunan infrastruktur daerah seperti infrastruktur transportasi dan sumberdaya air (Dokumen RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-15). Permasalahan infrastruktur pembangunan ekonomi tersebut juga dijelaskan dalam dokumen RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025. RPJPD menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Kota Tidore Kepulauan yang belum maksimal disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, dan terbatasnya infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, kedepan pemeliharaan, peningkatan, dan penyediaan infrastruktur transportasi, penataan lingkungan, dan pengelolaan sumberdaya air perlu lebih ditingkatkan (Dokumen RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025).

Dalam sisi yang lain, pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah, daerah harus mempunyai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Gede Ardika, mantan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bahwa “Pembangunan kepariwisataan daerah di Indonesia harus dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Dalam RIPPDA itu terangkum semuanya, mulai dari perencanaan, visi, cita-cita, dan strategi yang akan dikembangkan hingga cara pembangunannya seperti apa. Setelah rampung, RIPPDA harus di-Perdakan” (TrevelfplusIndonesia.blokspot.com). Pernyataan Gede Ardika tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada pernyataan Gede Ardika dan regulasi kepariwisataan di atas, maka Kota Tidore Kepulauan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata harus mempunyai RIPPDA. Namun, kenyataannya hingga saat ini (2015) Kota Tidore Kepulauan belum mempunyai RIPPDA. Realitas empirik tersebut secara normatif tidak sesuai dengan kebijakan daerah. Dokumen RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 menyebutkan secara tegas bahwa dalam perumusan visi, misi, dan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Tidore Kepulauan pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah aspek kebudayaan, pemerintahan, pelayanan jasa-jasa dan pariwisata sebagai dasar pertimbangan penting.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang dirumuskan dalam Dokumen RPJPD Kota Tidore Kepulauan 2005-2025 menjelaskan secara tegas bahwa “Sektor pariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan



memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan serta keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah serta adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk mendorong kegiatan ekonomi rakyat.”

Selain itu, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan 2010-2015 menyebutkan bahwa pariwisata perlu dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi lokal dan memperluas kesempatan kerja. Pengembangan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi sektor unggulan, dan sebagai pusat lokomotif ekonomi daerah, karena memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian maka keberadaan RIPPDA sebagai landasan kebijakan pembangunan pariwisata Kota Tidore Kepulauan merupakan sebuah kebutuhan.

Permasalahan perencanaan pembangunan pariwisata yang dihadapi oleh Kota Tidore Kepulauan disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam mengelola sumber-sumber wisata, dan lemahnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan kebudayaan dan pariwisata. Untuk itu, kedepan pariwisata perlu dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal dan memperluas kesempatan kerja (Dokumen RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-15). Secara konseptual menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2006) daerah dalam perencanaan pembangunan harus memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik tentang konsep perencanaan pembangunan.

Selain permasalahan pembangunan pariwisata yang bersifat parsial, dan pelaksanaan pembangunan pariwisata yang belum memiliki pijakan kebijakan dalam bentuk RIPPDA hingga akhir tahun 2015. Pada sisi yang lain, berdasarkan hasil analisis secara kuantitatif dengan teknik analisis *Location Quotient* (LQ)

dan *Shift Share Analysis* (SSA) sebagai salah satu model pendekatan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, di mana data hasil analisis indeks LQ menunjukkan bahwa sektor basis dalam perekonomian Kota Tidore Kepulauan adalah sektor pertanian, dan sektor perdagangan, perhotelan dan restoran. Selanjutnya dengan menggunakan indikator SSA, menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang sangat cepat pertumbuhannya di Kota Tidore Kepulauan dibandingkan dengan rata-rata secara nasional adalah sektor pertanian, dan sektor perdagangan, perhotelan dan restoran. Sedangkan perbandingan kecepatan pertumbuhan terhadap masing-masing sektor ekonomi di Kota Tidore Kepulauan, menunjukkan bahwa sektor perdagangan, perhotelan dan restoran memiliki kecepatan pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya, dan sektor yang sangat lambat pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Selanjutnya, sektor ekonomi yang dinilai memiliki daya saing kuat dan tinggi di Kota Tidore Kepulauan adalah perdagangan, perhotelan dan restoran (data dan hasil analisis tersaji di Bab III). Dengan menggunakan hasil analisis LQ dan SSA tersebut maka sangat ideal jika Kota Tidore Kepulauan menjadikan pariwisata sebagai sektor basis dan ekonomi unggulan dalam pembangunan perekonomian daerah.

Selain itu, berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Tidore Kepulauan (2015), tentang laju pertumbuhan riil PDRB Kota Tidore Kepulauan menurut lapangan usaha periode 2011-2014, menunjukkan bahwa pertumbuhan riil sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Sedangkan sektor-sektor yang berkaitan dengan industri kepariwisataan, seperti perdagangan, hotel dan restoran, dan pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun bersifat fluktuatif. Data tentang laju pertumbuhan riil PDRB

Kota Tidore Kepulauan menurut lapangan usaha tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Riil (persen) PDRB Kota Tidore Kepulauan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014

No.	Potensi Perekonomian	Persentase Distribusi			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian	3,33	5,68	3,03	2,09
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,77	7,80	3,20	3,12
3.	Industri Pengolahan	1,99	3,11	5,79	8,88
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	21,88	25,96	11,57	58,76
5.	Bangunan	6,65	12,65	3,75	3,96
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,00	13,79	14,86	15,19
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	10,41	12,71	16,08	17,99
8.	Keuangan, Persewahan dan Jasa Usaha	25,56	10,21	8,48	3,31
9.	Jasa-Jasa	39,09	27,55	32,25	37,75

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan (2015)

Namun, berdasarkan data BPS Kota Tidore Kepulauan (2014) kegiatan perekonomian Kota Tidore Kepulauan selama ini lebih besar pada sektor pertanian, walaupun pertumbuhan sektor tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tidore Kepulauan dalam empat tahun terakhir (2010-2013) dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Distribusi Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2013

No.	Potensi Perekonomian	Persentase Distribusi			
		2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	50,16	49,92	49,24	48,48
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,06	1,07	1,05
3.	Industri Pengolahan	4,91	4,89	4,85	4,83
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,28	0,29	0,30	0,32
5.	Bangunan	3,44	3,50	3,58	3,57
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,29	27,78	28,61	29,48
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,75	4,55	4,40	4,25
8.	Keuangan, Persewahan dan Jasa Usaha	1,48	1,47	1,47	1,48
9.	Jasa-Jasa	6,60	6,53	6,45	6,55
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan (2013; dan 2014)

Dengan menggunakan data tersebut memberikan gambaran bahwa, tumpuan perekonomian Kota Tidore Kepulauan saat ini adalah sektor pertanian. Karena kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Tidore Kepulauan cukup dominan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 50,16 persen, dan pada tahun 2013 sebesar 48,48 persen.

Realitas tersebut merupakan suatu kenyataan yang kontradiktif secara konseptual. Dimana, Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah perkotaan idealnya yang menjadi basis pembangunan ekonomi daerah adalah sektor industri dan jasa. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurcholis, dkk (2009: 5) Kota merupakan pemerintah daerah yang bersifat perkotaan. Kota sebagai daerah perkotaan yang mempunyai ciri: daerahnya berupa kawasan pemukiman padat, sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat layanan kesehatan, dan penduduknya sebagian besar bekerja di sektor industri, jasa, perdagangan baik formal maupun informal, PNS, TNI, Polri, serta wiraswasta. Senada dengan Nurcholis, dkk tersebut, Pasal 355 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa perkotaan dapat berbentuk: kota sebagai daerah otonom, dan kawasan perkotaan. Perkotaan menurut undang-undang tersebut adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa.

Irwan (2004: 31) menjelaskan bahwa kota adalah "Suatu areal dimana terdapat atau menjadi pemusatan penduduk dengan kegiatannya dan merupakan tempat konsentrasi penduduk dan pusat aktivitas perekonomiannya berupa industri, perdagangan, dan jasa. Badan Standardisasi Nasional (2004) yang melihat kota dalam prespektif regulasi menjelaskan bahwa kota merupakan

pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang dicirikan oleh batasan administratif yang diatur dalam peraturan perundangan serta didominasi oleh kegiatan produktif bukan pertanian.

Menyimak pengertian kota dan perkotaan di atas maka dapat dipahami bahwa kota dapat dilihat dalam prespektif: pertama, secara geografis. Artinya, kota merupakan sebuah ruang wilayah geografi yang mempunyai sistem kewilayahan dan administrasi yang di dalamnya terdapat aktifitas dan interaksi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan; Kedua, secara demografis. Kota merupakan suatu ruang wilayah di mana terdapat konsentrasi penduduk dengan tingkat kepadatan tertentu dengan mobilisasi sosial dan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya; Ketiga, secara sosial budaya. Kota merupakan suatu lingkungan dengan pola sosial budaya yang sangat heterogen, dan relatif tinggi terjadi perubahan sosial budaya dan ekonominya; Keempat, secara sosial ekonomis. Kota merupakan suatu lingkungan di mana kegiatan perekonomian dan kegiatan usaha yang beragam secara cepat, dan kegiatan perekonomian didominasi oleh kegiatan usaha jasa, perdagangan, perangkutan, dan perindustrian.

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom dengan karakter daerah perkotaan sebagaimana dijelaskan di depan maka idealnya yang menjadi basis pembangunan perekonomian daerahnya adalah sektor industri, jasa, serta perdagangan, bukan sektor pertanian. Fenomena tersebut sebagaimana dijelaskan dalam RPJPD Kota Tidore Kepulauan bahwa arah dan kebijakan pembangunan selama ini tidak berdasarkan pada pertimbangan karakteristik daerah. Dimana Kota Tidore Kepulauan dengan karakteristik daerah perkotaan

yang seharusnya basis perekonomiannya adalah perdagangan, industri, dan jasa, namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu pertanian.

Melihat realitas tersebut maka Kota Tidore Kepulauan dengan kekayaan pariwisata yang sangat banyak dan ragam, serta memiliki visi dan misi untuk membangun potensi pariwisatanya sebagai sektor ekonomi unggulan daerah sebagaimana dijelaskan di depan sangat tepat. Daerah dengan yang memiliki pariwisata kaya dan dikelola secara baik dan profesional dapat menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Gede Ardika, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2000-2004 bahwa “Lewat pembangunan kepariwisataan antara lain dapat membuka lapangan usaha bagi masyarakat dan juga meningkatkan PAD” (TrevelplusIndonesia.blokspot.com).

Kontribusi industri pariwisata terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja tersebut sebagaimana hasil penelitian Chindris-Vasioiu dan Tocan (2015) di Romania. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:

*Besides allowing a higher valorization of natural resources, tourism contributes to the development of local economies. Another important role that tourism has in national economies is to generate jobs and help decrease unemployment. The contribution of tourism in sociohuman sector is as important as in economic terms.*

Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan pariwisata memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi daerah. Manfaat penting lain dari pembangunan pariwisata adalah menciptakan lapangan kerja dan membantu menurunkan angka pengangguran di daerah.

Selain hasil penelitian Chindris-Vasoiu dan Tocan di Romania tersebut, dalam case yang berbeda, berdasarkan hasil penelitian Bento (2016) di Portugal, menyimpulkan bahwa *“The results are indicative of a causal link amongst domestic tourists and economic growth, and therefore this study confirms that tourism is an important source of economic growth.”*

Penelitian Bento tersebut dengan menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil uji hipotesisnya menjelaskan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, dalam kesimpulan hasil penelitiannya, Bento menegaskan bahwa pariwisata merupakan sumber penting dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika pariwisata dimanajemen secara baik dan profesional, serta dengan konsep pembangunan yang tepat oleh pemerintah maka dapat memberikan manfaat yang positif terhadap perekonomian dalam bentuk penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan negara/daerah.

Pada penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Pratt (2015), pada beberapa provinsi di China menjelaskan bahwa:

*“The tourism industry in China has increased dramatically in recent years. Because of larger multiplier effects, the more economically developed provincial economies will experience greater economic benefits as a result of further increases in tourism. However, several inland provinces are also poised to benefit from increased tourism. Increases in visitor arrivals in these provinces have the potential to benefit both the tourism sectors and those sectors that demand and supply services to these industries. This is an attractive source of economic development in lesser developed provinces.”*

Melalui berbagai hasil studi di atas memberikan gambaran dan argumentasi bahwa industri pariwisata memiliki peran dan mempunyai kontribusi positif dan signifikan terhadap perekonomian dan pendapatan daerah di suatu daerah jika pariwisata dimanajemen secara baik dan profesional. Untuk Indonesia, peluang

industri pariwisata dapat meningkatkan perekonomian daerah dikarenakan berdasarkan data yang dirilis oleh BPS (2015) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan asing atau mancanegara ke Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan	Peningkatan (%)
1	2014	9.435.411	7,19
2	2013	8.802.129	9,42
3	2012	8.004.462	5,16
4	2011	7.649.731	9,24
5	2010	7.002.944	10,74

Sumber: Diolah dari data BPS (2015)

Melalui data tersebut, terlihat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dan pada tahun 2015 kunjungan wisman ke Indonesia naik 2,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2016). Selanjutnya menurut Kementerian PPN/BAPPENAS (2016), bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat, dibawah Thailand, Malaysia, Singapura. Data tersebut memberikan gambaran bahwa dengan adanya pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang mempunyai potensi pariwisata untuk dapat menarik kunjungan wisatawan ke daerahnya yang kemudian dapat meningkatkan perekonomian daerah dan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.

Prospek industri pariwisata untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian domestik Indonesia sangat menjanjikan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya “Industri pariwisata yang saat ini menjadi penyumbang PDB terbesar keempat bagi negara setelah minyak dan gas, batu bara, dan minyak kelapa sawit, dan



diproyeksikan akan menunjukkan tren yang meningkat hingga bisa mengungguli ketiga komoditas utama tersebut pada 2019.” Lebih lanjut Arief Yahya menyebutkan bahwa “Industri pariwisata Indonesia pada 2014 telah menyerap sekitar 8,7 juta tenaga kerja dan menyumbang 4 (empat) persen PDB. Sementara pada 2019, pemerintah menargetkan industri pariwisata menyerap sekitar 13 juta tenaga kerja” (Antaranews.com, 10 Februari 2015). Artinya, kedepan industri pariwisata memberikan peluang untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat daerah, dan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan melihat realitas tersebut maka Kota Tidore Kepulauan dengan potensi pariwisata yang sangat kaya dan potensial sebagaimana telah disebutkan di depan, mempunyai peluang untuk mengembangkan kekayaan pariwisata yang dimilikinya sebagai sektor ekonomi unggulan daerah untuk dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerahnya. Pada sisi yang lain, objek wisata yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan mempunyai daya tarik, dan telah mampu menarik minat para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikut adalah data kunjungan wisatawan ke Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 1.5 Kunjungan Wisatawan di Kota Tidore Kepulauan

No.	Tahun	Kunjungan Wisatawan		Negara Asal Wisatawan Asing
		Lokal	Asing	
1.	2011	1413	86	Amerika, Belanda, Spanyol, Portugal, Italia, Swiss, Australia.
2.	2012	2741	256	Belanda, Amerika, Jerman, Rusia, New Zeland, Australia, Italia, Swiss
3.	2013	1589	94	Belanda, Amerika, Rusia, Spanyol, Letvia, Hungaria
4.	2014	2760	146	Amerika, Portugal, Prancis, Italia, Spanyol, Afrika
5.	2015	2897	227	Jerman, Belanda, Rusia, Italia, Australia, Swiss

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, 2016

Merujuk pada data kuantitatif tersebut tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa, secara kuantitatif minat para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing mengunjungi Kota Tidore Kepulauan untuk berwisata setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun bersifat fluktuatif. Kunjungan wisatawan asing ke Kota Tidore Kepulauan, tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebanyak 256 orang, kunjungan wisatawan asing yang banyak pada tahun ini dikarenakan diadakannya Sail Morotai, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2011 sebanyak 86 orang. Sedangkan wisatawan lokal yang mengunjungi Kota Tidore Kepulauan, secara kuantitatif tertinggi terjadi pada tahun 2015, sebanyak 2897 orang, dan yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebanyak 1413 orang. Untuk wisatawan lokal, secara umum mereka berasal dari: Kementrian, peneliti, wartawan radio dan televisi, pelajar, mahasiswa, LSM, lembaga sosial, dan lainnya (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore, 2016).

Namun demikian, Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerahnya harus mempunyai landasan dalam bentuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah proses yang melahirkan konsep pembangunan ekonomi daerah yang bersifat strategis dan melibatkan semua stakeholders pembangunan daerah seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, baik secara individual maupun kelembagaan seperti lembaga suadaya masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh EGAT/UP and The Urban Institute (2003: 1) *“Local economic development is a process of strategic planning through partnerships between local government, the business community and NGOs.”*

Dalam prespektif yang berbeda Kuncoro (2004: 46-48) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perancangan untuk suatu daerah. Perencanaan yang dilakukan oleh daerah untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Perencanaan yang dilakukan tersebut berorientasi ke depan dan dalam upaya membangun masyarakat berbasis kebutuhan daerah.

Berdasarkan konsep perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang dijelaskan oleh EGAT/UP *and The Urban Institute* dan Kuncoro di atas terdapat perbedaan prespektif, di mana EGAT/UP *and The Urban Institute* melihat perencanaan pembangunan ekonomi daerah sebagai sebuah proses yang berifat strategis dan harus melibatkan stakeholders daerah seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat tanpa menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan tersebut. Dalam prespektif yang berbeda Kuncoro menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan yang bersifat lokalistik yang dilakukan oleh daerah dengan tujuan untuk memperbaiki sumberdaya sektor swasta dan dalam upaya membangun masyarakat apa yang menjadi visi daerah. Namun demikian, Kuncoro tidak menyebutkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut.

Menyimak konsep perencanaan pembangunan daerah di atas maka idealnya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempunyai perencanaan sebagai pengarah. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Abe (2005: 46) bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai petunjuk bagi

daerah tentang mengenai apa yang dilakukan dan batas-batas apa yang tidak dapat dilakukan oleh daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal dari pandangan: (1) menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. Artinya, pembangunan daerah hanya bersifat pembangunan “oleh Pemerintah Pusat” di daerah sehingga masyarakat daerah tidak mampu mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk menentukan nasib sendiri; dan (2) lahirnya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka penerapan kebijakan desentralisasi (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2006: 64).

Dengan demikian maka Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata sebagai ekonomi unggulan daerah sebagaimana yang diatur dalam RPJPD dan RPJMD perlu melakukan perencanaan sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata tersebut. Menurut Yoeti (2007) Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan obyek dan daya tarik wisata pada destinasi wisata. Bentuk nyata dan hasil dari upaya tersebut adalah keindahan alam, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan budaya, serta peninggalan sejarah dan keberbukalaan. Selain pengembangan obyek wisata, pembangunan kepariwisataan juga dilakukan dalam bidang usaha jasa dan sarana pariwisata. Untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata maka pembangunan prasarana pariwisata yang memadai.

Terkait dengan pembangunan destinasi pariwisata, Kementrian Koperasi dan UKM RI (2016: 32) menyebutkan komponen utama dalam pembangunan destinasi pariwisata adalah: Pembangunan fisik daya tarik wisata; Peningkatan penyediaan fasilitas umum dasar; Peningkatan kemudahan dan ketersediaan informasi; Pembangunan infrastruktur pendukung; Perbaikan dan peningkatan aksesibilitas; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan konsep dan komponen yang tidak jauh berbeda dengan yang disebut oleh Kementrian Koperasi dan UKM di atas, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas (2016) mempunyai konsep perencanaan terintegrasi pengembangan destinasi wisata, menyebutkan komponen dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata sebagai berikut: Penyiapan Daya Tarik Wisata; Pembangunan Sarana dan Prasarana Transpotrasi; Pembangunan Fasilitas Umum dan Pemeliharaan; Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan Listrik; Kelembagaan Pengembangan Destinasi; Koordinasi Pembangunan Destinasi.

Merujuk pada berbagai konsep pembangunan dan perancangan pembangunan pariwisata di depan, maka Kota Tidore Kepulauan yang telah mengkonsepkan dirinya sebagai daerah destinasi wisata harus membangun potensi pariwisata yang dimilinya. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan pariwisata diperlukan pengkajian yang komprehensif dan holistik sehingga melahirkan dokumen perencanaan yang realistis dan sesuai dengan eksistensi, permasalahan dan kebutuhan daerah.

## 1.2 Masalah dan Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan daerah otonom harus berbasis pada potensi daerah (Arsyad, 2002; Takahashi, 2003; dan Elmi, 2003). Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempunyai perencanaan sebagai pengarah bagi daerah (Abe, 2005). Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh daerah merupakan pelaksanaan salah satu kewenangan dan kewajiban daerah otonom (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2006: 64).

Namun demikian daerah otonom dalam melaksanakan kewenangannya diperhadapkan pada banyak masalah seperti keterbatasan sumberdaya alam, keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan kelembagaan (Arsyad, 2002), keterbatasan sumberdaya fiskal (Arsyad, 2002; dan Smith, 1985), keterbatasan infrastruktur, dukungan kebijakan, dan rencana pembangunan yang lemah (Saragih, 2015). Pada sisi kebijakan pemerintah pusat dianggap belum memiliki kemauan politik (*political will*) yang kuat dalam memberikan ruang kewenangan yang cukup kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian daerah sebagai sumber pendapatan daerah (Smith, 1985; Yani, 2009; dan Muluk, 2008).

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperhadapkan pada permasalahan yang sama dan cukup kompleks. Pertama, Kota Tidore Kepulauan memiliki objek pariwisata yang sangat kaya, namun kekayaan pariwisata tersebut belum dibangun dan dikelola secara baik sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan pendapatan daerah. Kedua, visi dan misi pembangunan ekonomi yang dirumuskan dalam dokumen RPJPD dan RPJMD,

Kota Tidore Kepulauan dirancang menjadi kota industri, jasa dan pariwisata, dan pariwisata dijadikan sebagai sektor unggulan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Kota Tidore Kepulauan belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan pariwisata sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sehingga pembangunan pariwisata belum maksimal dan tidak bersifat holistik. Ketiga, pembangunan ekonomi Kota Tidore Kepulauan dengan menjadikan pertanian sebagai basis perekonomian daerah selama ini tidak sesuai dengan kapasitas dan status Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah kota serta visi dan misi pembangunan ekonomi daerahnya.

Merujuk pada permasalahan di atas maka melahirkan suatu pertanyaan penting dari studi ini: bagaimana perencanaan pembangunan destinasi pariwisata yang harus dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan daerah. Berdasarkan pertanyaan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, yang selanjutnya pertanyaan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyiapan objek dan daya tarik destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan?
2. Bagaimanakah fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata di Kota Tidore Kepulauan?
3. Bagaimanakah pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Kota Tidore Kepulauan?
4. Bagaimanakah pembangunan fasilitas umum pendukung di Kota Tidore Kepulauan?
5. Bagaimanakah kelembagaan pengembangan destinasi wisata di Kota Tidore Kepulauan?

6. Bagaimanakah koordinasi dalam pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan?
7. Bagaimanakah model inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk melihat bagaimana perencanaan pembangunan destinasi pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan daerah yang dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Penyiapan objek dan daya tarik destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan.
2. Fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Kota Tidore Kepulauan.
4. Pembangunan fasilitas umum pendukung di Kota Tidore Kepulauan.
5. Kelembagaan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.
6. Koordinasi dalam pembangunan destinasi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.
7. Menemukan model inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Tidore Kepulauan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Harapan dari hal penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dan praktis.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, utamanya kajian perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah, dan kajian



perencanaan pembangunan destinasi pariwisata. Selain dimensi keilmuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam kajian pembangunan ekonomi daerah, serta partisipasi publik dalam pembangunan ekonomi daerah.

#### **1.4.2. Manfaat Parktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomnadi kepada: pertama, pemerintah pusat tentang pentingnya desentralisasi, baik desentralisasi politik (*devolusi*) dan desentralisasi fiskal. Indonesia adalah sebuah negara-bangsa (*nation-state*) sangat besar secara geografi, demografi, dan kultur. Dengan demikian, negara ini tidak akan dapat diurus secara sendiri oleh pemerintah pusat secara sentralistik, oleh karena itu diperlukan desentralisasi politik dan fiskal secara proporsional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan nasional.

Kedua, pemerintah daerah tentang pentingnya pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi daerah. Melalui pembangunan ekonomi daerah kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditingkatkan. Pembangunan ekonomi daerah harus didesain secara cermat dan bijaksana melalui perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan publik dalam proses perumusan dan pelaksanaan pembangunan adalah hal yang sangat penting. Pada sisi yang lain desain perencanaan pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara imitatif dari daerah lain, tetapi harus berdasarkan potensi sumberdaya unggulan daerah. Untuk itu, diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada daerah, serta dapat memberikan kesadaran kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat daerah

tentang pentingnya kerjasama yang berimbang dan sinergi dari semua pihak dalam manajemen pembangunan ekonomi daerah.

Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Paling tidak dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Kota Tidore Kepulauan tentang minimnya sumber pendapatan asli daerah, baik dalam sisi basis maupun volumenya. Dengan adanya perencanaan pembangunan destinasi pariwisata yang baik sehingga dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata dapat dilakukan secara terencana, terukur, efektif dan efisien. Dengan demikian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah yang akan berpengaruh terhadap volume pendapatan daerah. Pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan pemerintahan, dan pelayanan publik, serta memperkuat posisi daerah sebagai daerah otonom. Selain manfaat tersebut, diharapkan dengan semakin kuatnya keuangan dan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Untuk melakukan dan mencapai harapan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang baik, dan dilakukan secara komprehensif dan holistik.